

Transformasi dari Korwil Menjadi Cabang pada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia di Banten Tahun 1980-2000

Virli Aurelya Putri Apandi¹ Eko Ribawati² Rikza Fauzan³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: 2288220037@untirta.ac.id¹ eko.ribawati@untirta.ac.id² rikza.fauzan@untirta.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banten dari status Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang pada periode 1980-2000. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya penelitian mengenai sejarah organisasi pers di tingkat daerah, khususnya terkait perubahan struktur kelembagaan PWI yang berimplikasi terhadap profesionalisme wartawan dan perkembangan pers lokal. Penelitian ini menggunakan metode historis menurut Helius Syamsudin terdiri atas empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer berupa arsip surat kabar sezaman, dokumen organisasi PWI, serta wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PWI Banten berkembang sebagai Koordinator Wilayah sejak awal 1980-an di bawah struktur PWI Jawa Barat dengan kewenangan yang masih terbatas dan bersifat koordinatif. Transformasi dari Korwil menjadi Cabang dipengaruhi oleh perubahan politik nasional pasca-Reformasi 1998, meningkatnya tuntutan profesionalisme wartawan, serta lahirnya Provinsi Banten pada tahun 2000. Perubahan status tersebut mendorong peningkatan kemandirian organisasi, penguatan struktur kelembagaan, perluasan program pembinaan wartawan, serta penguatan penerapan Kode Etik Jurnalistik. Setelah menjadi Cabang, PWI Banten menunjukkan perkembangan yang lebih dinamis dalam mendukung profesionalisme wartawan dan penguatan pers lokal di tengah era kebebasan pers pasca-Reformasi.

Kata Kunci: Transformasi Organisasi, Persatuan Wartawan Indonesia, Banten, Koordinator Wilayah (Korwil), Cabang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi profesi kewartawanan di Indonesia merupakan bagian penting dalam sejarah pers nasional karena berkaitan erat dengan perubahan sistem politik, kebebasan pers, dan profesionalisme wartawan. Salah satu organisasi yang memiliki peran strategis adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sejak berdiri pada tahun 1946 menjadi wadah profesi wartawan sekaligus mengalami berbagai perubahan kelembagaan mengikuti dinamika politik nasional. Pada masa Orde Baru, struktur organisasi PWI cenderung bersifat sentralistik melalui sistem Koordinator Wilayah (Korwil), sedangkan setelah Reformasi organisasi mulai mengalami penyesuaian menuju struktur yang lebih mandiri seiring berkembangnya demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi tata kelola organisasi, tetapi juga berdampak terhadap pembinaan profesionalisme wartawan serta perkembangan pers di tingkat daerah.

Kajian mengenai sejarah Persatuan Wartawan Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian Raditya Esha Wicaksono (2022) membahas dinamika PWI Cabang Yogyakarta pada masa Orde Baru dan menunjukkan bahwa organisasi tersebut mengalami perubahan fungsi dari organisasi profesi menuju instrumen kontrol negara. Penelitian Muhammad Nur Faiz (2020) mengkaji upaya PWI Cabang Jawa Tengah dalam memperkuat profesionalisme wartawan melalui pembinaan organisasi dan penerapan

Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, penelitian Dhanti Salsabila Aziz dkk. (2024) mengenai PWI Riau menjelaskan hubungan organisasi PWI dengan kekuasaan politik Orde Baru beserta berbagai dinamika internal yang terjadi. Kajian terbaru Nur Haini dkk. (2025) mengenai PWI Kalimantan Timur juga memperlihatkan bagaimana perkembangan organisasi pers daerah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah organisasi pers di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada hubungan PWI dengan kekuasaan politik, perkembangan organisasi di tingkat provinsi, maupun upaya peningkatan profesionalisme wartawan. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji transformasi kelembagaan PWI dari status Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang, terutama pada wilayah yang mengalami perubahan status administratif seperti Provinsi Banten. Padahal perubahan kelembagaan tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan mencerminkan perubahan struktur organisasi, kewenangan kelembagaan, pola pembinaan wartawan, serta kemandirian organisasi dalam menghadapi era Reformasi dan lahirnya Provinsi Banten pada tahun 2000.

Penelitian mengenai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada dinamika organisasi di tingkat nasional maupun pada cabang-cabang di beberapa daerah. Kajian yang membahas perubahan kelembagaan PWI di Banten, khususnya transformasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang pada periode 1980–2000, masih sangat terbatas. Padahal, perubahan tersebut tidak hanya menunjukkan peralihan struktur organisasi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan kewenangan, pembinaan organisasi, serta perkembangan profesionalisme wartawan di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengkaji transformasi kelembagaan PWI Banten dalam kaitannya dengan lahirnya Provinsi Banten, perubahan politik pada masa Reformasi, dan perkembangan pers lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan historiografi organisasi pers di Indonesia, khususnya dalam kajian sejarah pers di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis menurut Helius Syamsudin terdiri atas empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas sumber primer berupa arsip surat kabar sezaman, dokumen organisasi PWI, serta wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari sumber tertulis yang relevan. Kemudian Kritik sumber sebagai tahapan evaluasi yang dijalankan oleh seorang peneliti. Tujuan dari tahapan ini untuk mengetahui tingkat keakuratan sumber-sumber terdahulu yang dipakai dalam sebuah penelitian. Interpretasi bertujuan untuk menafsirkan makna dari data sejarah yang ditemukan dan tahapan terakhir yaitu historiografi menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan objektif (Sjamsuddin, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya PWI Banten Sebelum Bertransformasi Dari Korwil Menjadi Cabang

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan membentuk struktur kepengurusan di berbagai daerah untuk memperluas pembinaan organisasi dan mengakomodasi perkembangan pers di tingkat lokal. Pada masa Orde Baru, pembentukan organisasi daerah dilakukan melalui sistem cabang maupun Koordinator Wilayah (Korwil) yang berada di bawah koordinasi PWI tingkat provinsi. Di wilayah Banten yang saat itu masih

menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, organisasi kewartawanan berkembang melalui mekanisme tersebut sehingga aktivitas organisasi, pembinaan anggota, dan pengambilan keputusan masih berada di bawah koordinasi PWI Jawa Barat (PWI Jawa Barat, 1989). Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menempatkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui secara resmi sehingga memiliki fungsi strategis dalam pembinaan kehidupan pers nasional. Perkembangan organisasi wartawan di Banten diawali dengan terbentuknya Corps Wartawan Banten (CWB) pada tahun 1973 sebagai wadah solidaritas para wartawan di wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Berdasarkan arsip *Harian Abadi* edisi 28 Maret 1973 dan hasil wawancara dengan Drs. H. Agus Sandjadirdja (Ketua pertama PWI Banten), pembentukan CWB dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas jurnalistik di Banten serta kebutuhan akan organisasi yang mampu mempererat hubungan antarwartawan, memfasilitasi koordinasi profesi, dan meningkatkan pembinaan etika jurnalistik. Keberadaan CWB menjadi embrio organisasi kewartawanan di Banten sebelum terbentuknya struktur PWI secara formal. Meskipun tidak bertahan lama, organisasi ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran wartawan daerah untuk membangun wadah profesi yang lebih terorganisasi. (Sumadiria, 2006).

Setelah CWB tidak lagi aktif, pembinaan organisasi kewartawanan di Banten dilanjutkan melalui pembentukan PWI Penghubung Banten yang berada di bawah koordinasi PWI Cabang Jawa Barat. Pada tahap ini, kepemimpinan organisasi ditetapkan melalui musyawarah dengan masa jabatan tiga tahun dan belum dibatasi jumlah periode kepemimpinan. Seiring perkembangan organisasi, status tersebut kemudian berubah menjadi PWI Korwil Banten pada dekade 1980-an. Sebagai Korwil, PWI Banten belum memiliki kewenangan organisasi secara mandiri karena seluruh kebijakan strategis, pembinaan anggota, serta pelaksanaan program kerja masih berada dalam koordinasi PWI Jawa Barat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara PWI Korwil Banten dan PWI Jawa Barat berlangsung cukup erat, terutama pada masa kepemimpinan Drs. H. Yayat Hendiyana yang memberikan perhatian terhadap pengembangan organisasi kewartawanan di Banten. (Wawancara Drs. H. Agus Sanjadirdja, 19 Mei 2026). Perkembangan PWI Korwil Banten tidak dapat dipisahkan dari situasi politik Orde Baru yang menempatkan pers sebagai instrumen stabilitas nasional. Hubungan yang cukup dekat antara organisasi pers dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pengembangan kelembagaan, seperti bantuan fasilitas organisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa independensi organisasi pers masih terbatas karena aktivitas kewartawanan berada dalam pengawasan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan teori transformasi organisasi Kurt Lewin (1951) yang menjelaskan bahwa perubahan organisasi diawali oleh munculnya kesadaran atas keterbatasan struktur yang ada (*unfreezing*). Dalam konteks PWI Banten, keterbatasan kewenangan sebagai Korwil serta meningkatnya kebutuhan akan organisasi yang lebih mandiri menjadi faktor yang mendorong perubahan kelembagaan. Selain itu, kondisi tersebut juga mendukung pandangan McQuail (2011) bahwa profesionalisme jurnalistik menuntut independensi organisasi, kompetensi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Oleh karena itu, perkembangan PWI Banten sejak CWB hingga PWI Korwil merupakan fondasi penting yang melatarbelakangi transformasi organisasi menjadi PWI Cabang pada akhir periode penelitian.

Proses Transformasi PWI Banten Dari Status Koordinator Wilayah (Korwil) Menjadi Cabang

Transformasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten dari status Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang merupakan proses yang berlangsung secara bertahap sebagai respons terhadap dinamika organisasi dan perubahan lingkungan politik. Selama

berstatus sebagai Korwil, PWI Banten masih berada di bawah koordinasi PWI Jawa Barat sehingga kewenangan organisasi dalam penyusunan program kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan anggota masih terbatas. Meskipun berperan sebagai wadah profesi wartawan di daerah, pola organisasi yang sentralistik menyebabkan ruang gerak PWI Banten bergantung pada kebijakan PWI Jawa Barat dan PWI Pusat. Seiring meningkatnya jumlah wartawan dan berkembangnya aktivitas jurnalistik di Banten, muncul kebutuhan akan organisasi yang memiliki kewenangan lebih luas untuk mengelola urusan kewartawanan secara mandiri sesuai dengan karakteristik daerah. (Novita, 2018)

Dorongan untuk melakukan transformasi semakin menguat setelah terjadinya Reformasi 1998 yang membawa perubahan mendasar terhadap kehidupan pers di Indonesia. Berakhirnya sistem politik yang sentralistik membuka ruang yang lebih luas bagi kebebasan pers dan penguatan organisasi profesi di tingkat daerah. Selain dipengaruhi oleh perubahan politik nasional, transformasi PWI Banten juga dipercepat oleh pembentukan Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Perubahan status administratif tersebut menuntut penyesuaian struktur organisasi agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara mandiri dan merepresentasikan kepentingan wartawan di provinsi yang baru terbentuk. Dengan demikian, perubahan status PWI Banten tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan internal organisasi, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang berlangsung pada masa Reformasi (Masduki, 2003).

Perubahan status organisasi dilakukan melalui serangkaian koordinasi antara pengurus PWI Banten dan PWI Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Agus Sandjadirdja, usulan perubahan kelembagaan dibahas dalam berbagai forum organisasi hingga akhirnya memperoleh persetujuan dari PWI Pusat pada tahun 2000. Setelah perubahan status disahkan, dilaksanakan rapat organisasi untuk menetapkan kepengurusan pertama PWI Cabang Banten secara musyawarah, dengan Drs. H. Agus Sandjadirdja terpilih sebagai ketua pertama. Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian masa jabatan kepengurusan dari tiga tahun menjadi lima tahun sesuai ketentuan organisasi PWI, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada PWI Banten dalam menyusun program kerja, membina anggota, serta menjalin hubungan kelembagaan secara langsung dengan Pemerintah Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi PWI Banten tidak hanya berupa perubahan status administratif organisasi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam merespons perkembangan pers di daerah. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin (1951), khususnya pada tahap *changing*, yaitu ketika organisasi mulai mengimplementasikan perubahan terhadap struktur, sistem, dan pola kerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan yang baru. Selain itu, perubahan status menjadi Cabang memperkuat independensi organisasi dalam melaksanakan pembinaan profesi, penegakan kode etik, dan pengembangan kompetensi wartawan. Kondisi tersebut mendukung konsep profesionalisme jurnalistik yang dikemukakan McQuail (2011), bahwa organisasi profesi yang mandiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan. Oleh karena itu, transformasi PWI Banten pada tahun 2000 menjadi titik penting dalam perkembangan organisasi kewartawanan di Banten sekaligus menandai pergeseran dari organisasi yang bersifat koordinatif menuju organisasi yang memiliki kewenangan kelembagaan secara mandiri

Perkembangan PWI Banten Setelah Terjadinya Transformasi Menjadi Cabang Pada Awal Tahun 2000

Perubahan status Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten dari Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang pada tahun 2000 membawa dampak yang signifikan

terhadap penguatan kelembagaan organisasi. Setelah memperoleh status sebagai Cabang, PWI Banten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola organisasi, menyusun program kerja, serta mengambil keputusan tanpa bergantung pada koordinasi dengan PWI Jawa Barat. Penguatan kelembagaan tersebut ditandai dengan terbentuknya struktur kepengurusan yang lebih lengkap, penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi lima tahun, serta meningkatnya kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi administrasi, pembinaan anggota, dan hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan status organisasi menjadi landasan penting bagi berkembangnya PWI Banten sebagai organisasi profesi wartawan yang lebih mandiri (Wawancara Drs. H. Agus Sandjadirdja, 19 Mei 2026; Wawancara Teguh Akbar, 20 Mei 2026).

Penguatan organisasi juga didukung oleh hubungan kelembagaan yang semakin baik dengan Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai pihak swasta. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas organisasi serta kerja sama dalam mendukung pelaksanaan program kerja PWI Banten. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi tetap berupaya mempertahankan independensinya sebagai organisasi profesi yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif perkembangan organisasi, dukungan sumber daya eksternal menjadi salah satu faktor yang memperkuat kapasitas internal organisasi tanpa menghilangkan fungsi profesionalnya (Wawancara Muhaemin, 19 Mei 2026). Perubahan status menjadi Cabang turut mendorong peningkatan profesionalisme wartawan melalui berbagai program pendidikan dan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara, PWI Banten mulai menyelenggarakan pelatihan jurnalistik, seminar, diskusi, dan pembinaan kode etik secara lebih terstruktur dibandingkan ketika masih berstatus Korwil. Program-program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi wartawan seiring bertambahnya jumlah anggota dan berkembangnya dinamika pers pada era Reformasi. Perubahan lingkungan politik yang lebih demokratis juga memberikan ruang yang lebih luas bagi wartawan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Kondisi ini sejalan dengan konsep profesionalisme jurnalistik McQuail yang menekankan pentingnya kompetensi, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik sebagai landasan utama profesi kewartawanan. (McQuail, 2011)

Meskipun demikian, perkembangan PWI Banten sebagai organisasi yang baru berdiri tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan organisasi, serta kebutuhan membangun jaringan kelembagaan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Berbagai tantangan tersebut secara bertahap diatasi melalui konsolidasi organisasi, dukungan para anggota, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dari Korwil menjadi Cabang tidak hanya menghasilkan perubahan struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme wartawan, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Temuan ini memperkuat teori perkembangan organisasi Daft (2007) serta menunjukkan tahap *refreezing* dalam teori transformasi organisasi Kurt Lewin (1951), yaitu ketika perubahan kelembagaan mulai menjadi sistem yang stabil dan mampu mendukung perkembangan organisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi PWI Banten menjadi Cabang dapat dipandang sebagai titik penting dalam penguatan organisasi profesi wartawan sekaligus dalam perkembangan kehidupan pers di Provinsi Banten pada awal abad ke-21.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten dari Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi Cabang merupakan proses kelembagaan

yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Sebelum menjadi Cabang, perkembangan organisasi kewartawanan di Banten diawali dengan pembentukan *Corps Wartawan Banten* (CWB), kemudian berkembang menjadi PWI Penghubung dan PWI Korwil yang masih berada di bawah koordinasi PWI Jawa Barat. Perubahan status menjadi Cabang pada tahun 2000 didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan kemandirian organisasi, perkembangan komunitas wartawan di Banten, perubahan politik pasca-Reformasi, serta terbentuknya Provinsi Banten sebagai daerah otonom baru yang menuntut penyesuaian struktur organisasi profesi di tingkat daerah. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah status administratif organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan PWI Banten dalam menjalankan fungsi organisasi secara mandiri. Setelah menjadi Cabang, PWI Banten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun program kerja, membina anggota, memperkuat hubungan kelembagaan, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi wartawan. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan berkontribusi terhadap penguatan profesionalisme wartawan sekaligus mendukung perkembangan kehidupan pers di Provinsi Banten pada awal abad ke-21. Penelitian ini juga melengkapi kajian historiografi organisasi pers di Indonesia dengan memberikan gambaran mengenai proses transformasi kelembagaan PWI di daerah yang dipengaruhi oleh perubahan politik nasional dan pembentukan daerah otonom baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Daft, R. L. (2007). *Organization theory and design* (9. ed). Thomson/South-Western.
- Dhanti Salsabila Azis, Bunari, & Ahmal. (2024). The Indonesian Journalists Association (Pwi) In Riau During The New Order Era 1968-1998: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1088–1099. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3945>
- Lewin. K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. NY: Harper & Row.
- Masduki. (2003). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa Edisi 6*. Salemba Humanika.
- Novita, L. (2018). Independensi wartawan PWI Jawa Barat dalam berita keislaman. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–96.
- PWI Jawa Barat. (1989) *Buku Putih Jawa Barat*. PWI Jawa Barat.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Sumadiria, H. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis*
- Wawancara dengan Drs. H. Agus Sanjadirdja, 19 Mei 2026.
- Wawancara dengan Muhaemin, 19 Mei 2026.
- Wawancara dengan Teguh Akbar, 20 Mei 2026.